

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran KAN dalam memperjuangkan kepentingan kaum tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diinginkan oleh masyarakat maupun oleh KAN itu sendiri. Gagalnya KAN menyelesaikan permasalahan adat di nagari Pagaruyung disebabkan oleh beberapa factor :

1. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dinagari dalam pengelolaan tanah ulayat dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa KAN dalam menjalankan kebijakannya tidak beralan sesuai mestinya, ini terlihat dari gagalnya KAN menyelesaikan permasalahan Kaum Nan IV Tapi Tompo sehingga permasalahan adat ini harus diselesaikan di meja pengadilan
2. Struktur keanggotaan KAN sendiri tidak sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum pada Perda No.2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Keanggotaan KAN sendiri tidak dari niniak mamak 4 jinih sendiri melainkan di isi oleh masyarakat yang tidak terlalu mengenal adat itu sendiri.
3. Kebijakan KAN dalam pengelolaan tanah ulayat adalah untuk sekadar sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengetahui proses-proses adat yang ada di nagari Pagaruyung terutama yang berkaitan dengan tanah

ulayat termasuk didalamnya proses penyerahan tanah antara suatu kaum dengan pihak-pihak lain.

4.2 Saran

Diharapkan kepada ninik mamak yang menjadi anggota KAN dapat memahami fungsinya dan perannya sehingga KAN sebagai sebuah lembaga adat yang telah diformalkan oleh pemerintah menjadi sebuah lembaga yang mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam adat. Bagi masyarakat Minangkabau dalam menyangkut tanah ulayat atau harta pusaka tinggi hendaklah digunakan sebagaimana mestinya fungsi dari harta pusaka tinggi itu sendiri.

